



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAHAN DIGITAL MELALUI ARSITEKTUR SPBE

**AKSELERASI TRANSFORMASI PEMERINTAHAN DIGITAL INDONESIA
MELALUI PENGUATAN ARSITEKTUR SPBE**

Palangka Raya, 27 Juni 2024

Arahan Presiden Joko Widodo Tentang **Reformasi Birokrasi**



1.

Birokrasi yang
Berdampak,
Dirasakan Langsung
Masyarakat

2.

Reformasi Birokrasi
**Bukan Tumpukan
Kertas**

3.

Birokrasi **Lincah
dan Cepat**

(Ditopang Pemerintah Digital Berbasis Data)



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



DIGITAL

SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia

Istana Negara, Jakarta
27 Mei 2024



SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia



TEKNOLOGI UNTUK MEMUDAHKAN BIROKRASI PELAYANAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT

SPBE Summit - Istana Negara - 27 Mei 2024



Joko Widodo
@jokowi



Kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat sehingga seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan, manfaat yang diterima, hingga kemudahan urusan masyarakat.

GovTech INA Digital, teknologi untuk memudahkan birokrasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Sebelumnya terdapat 27 ribu aplikasi level pemerintahan pusat maupun daerah yang tidak terintegrasi. Maka, GovTech INA Digital diharapkan membuat semua terintegrasi, meminimalisasi birokrasi yang rumit, serta mengakselerasi sistem digital di sejumlah layanan prioritas.

GovTech INA Digital harus digunakan untuk memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik, juga meningkatkan daya saing Indonesia. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi serta data demi pemanfaatan GovTech INA Digital.



Target Transformasi Digital sesuai Perpres 82/2023

*"Saya perlu mengingatkan kita masih memiliki waktu 9 bulan, mari kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi, karena **transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan layanan digital** pemerintah harus benar-benar kita lakukan,"*

Penyederhanaan Aplikasi/Platform untuk lebih berdampak

*"Ribuan platform yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga harus **disederhanakan** dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi yang baru yang dimunculkan, yang berorientasi hanya ke proyek saja, tetapi hanya menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna, utamanya dalam layanan digital pemerintah,"*

Percepatan SPBE dan Integrasi pada Portal Nasional

*"Saya minta kepada Menpan RB untuk segera mempercepat implementasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis digital, **konsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional**, dan di saat yang sama juga sekali lagi, perkuat keamanan digital kita"*

Transformasi BUMN Peruri

*"Saya minta Menteri BUMN juga ikut mendukung **percepatan transformasi lewat Perum Peruri yang menjadi govtech nasional kita**"*

Arahan terkait Digital ID & Government Cloud

*"Mendagri, Menkominfo juga **mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID** paling lambat bulan 6 harus sudah selesai; dan juga Menkominfo untuk segera **transformasi kebijakan government cloud** untuk mempercepat peningkatan pelayanan digital kita; dan semuanya nanti dikoordinir oleh Menko Marinvest"*

ARAHAN PRESIDEN





MENUJU MASA DEPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Future Governance (Governance 5.0)

Perubahan paradigma yang semula
“Pemerintah mengatur masyarakat” menjadi
“**Pemerintah bekerja bersama masyarakat**”/
Masyarakat sebagai mitra
*(a mindset shift: “from governing for citizens
to governing with citizens”)*

**Penggerak/
Enabler:**

**Basis
Data**

Data-Driven



**Transformasi
Digital**

Digital by Design



**SDM
Berdaya
Saing**

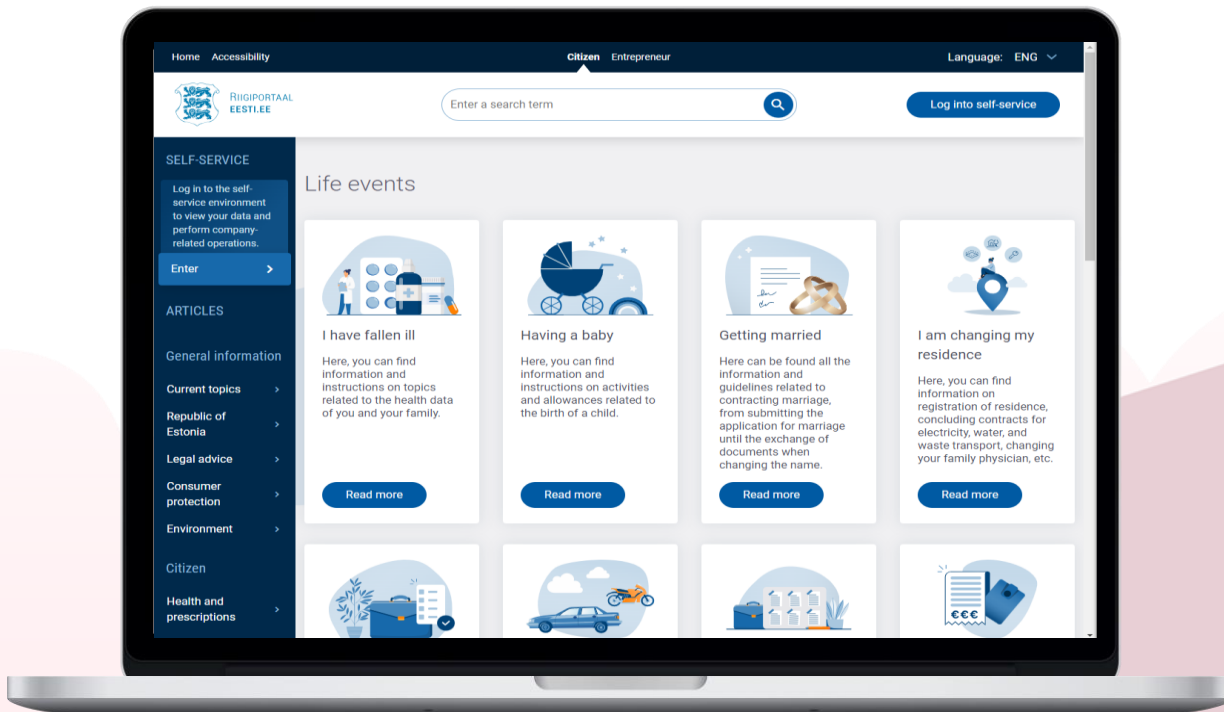
Digital Culture



Visi Layanan Digital Indonesia

PRAKTIK BAIK INTERNASIONAL: ESTONIA

Menu langsung cara mendapatkan layanan pekerjaan, kesehatan, kependudukan, bansos, kesehatan, persalinan, dll. (layanan bukan lagi government centric, melainkan citizen centric)



*contoh portal pemerintah Estonia

INISIASI AWAL DESAIN PORTAL NASIONAL INDONESIA



**NEGARA HADIR
KAPAN PUN,
DI MANA PUN.**

**CEPAT
MUDAH
MURAH**

Transformasi masif
layanan negara
dengan teknologi.

TANTANGAN: KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH

Kondisi Saat Ini

Harus Mengakses Berbagai Aplikasi

Masyarakat harus mengunduh berbagai aplikasi untuk setiap layanan (**kini ada puluhan ribu aplikasi**), diiringi dengan pengisian data yang berulang kali.

Rawan Kebocoran Data Pribadi

Semakin meningkat tren ancaman kebocoran data identitas pribadi dalam berbagai layanan masyarakat

Fotocopy KTP

Kebutuhan "fotocopy KTP" untuk mengakses layanan



Kondisi Seharusnya yang Kini Sedang Dikerjakan

Layanan Terintegrasi dan Single Sign On

1 Portal untuk berbagai layanan, dengan akses *single-sign on* (SSO) melalui pemanfaatan sertifikat elektronik. Sekali isi data untuk berbagai layanan.

Menekan Kebocoran Data

Menekan kebocoran data pribadi melalui penguatan keamanan informasi dengan teknologi dan proses yang modern, serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat.

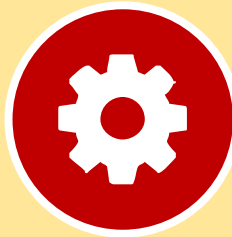
Identitas Digital yang Aman

Tidak perlu fotocopy KTP. Akses dengan identitas digital tanpa memindahtangankan data pribadi.



SPBE SEBAGAI *LEVERAGE* TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah **penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.**



TUJUAN SPBE

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel
- Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
- Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE

DAMPAK SPBE

Terwujudnya hasil berbagai program prioritas pemerintah seperti:

- pengentasan kemiskinan
- pemberantasan korupsi
- peningkatan investasi
- penggunaan produk dalam negeri

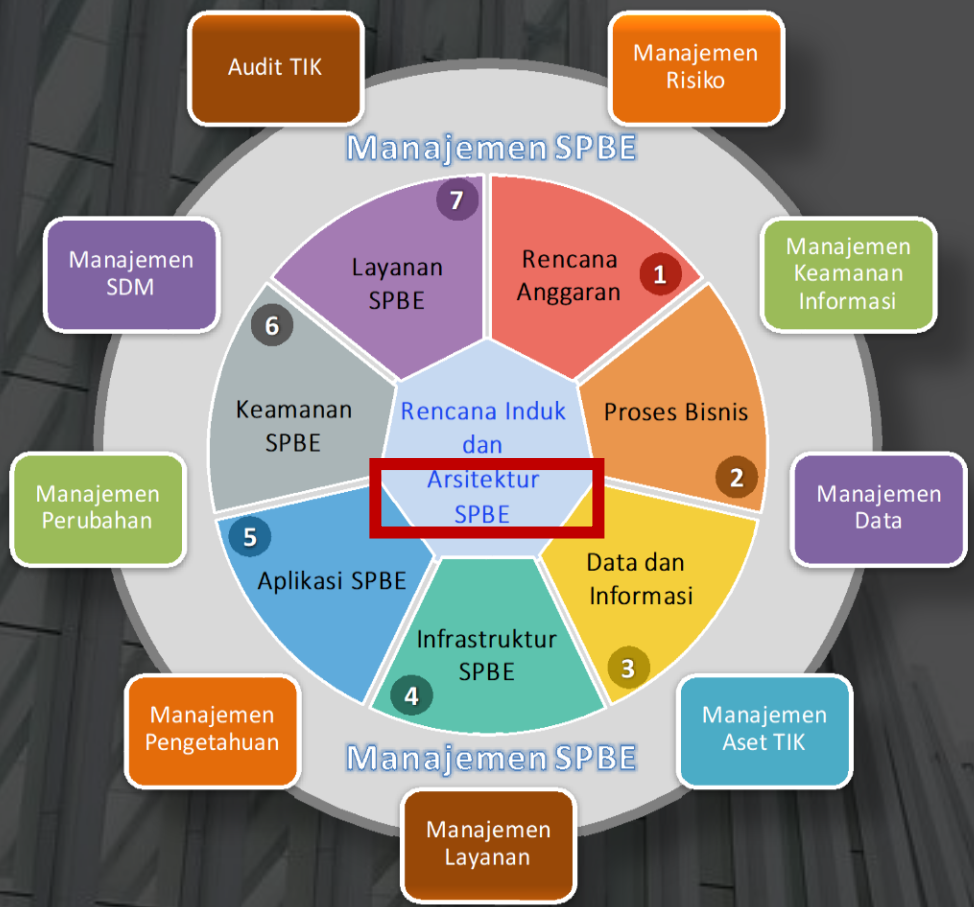
KERANGKA KERJA PERPRES 95/2018 meliputi seluruh unsur-unsur SPBE



Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE Nasional, sebagai payung hukum keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis SPBE



KERANGKA KERJA PERPRES 95/2018 - SPBE



TATA KELOLA SPBE

Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu



MANAJEMEN SPBE

Melaksanakan pengelolaan unsur-unsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkelanjutan



PENYELENGGARA SPBE

- Tim Koordinasi SPBE Nasional
- Pelaksana SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah



LAYANAN SPBE

- Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (G2G/G2E)
- Layanan Publik Berbasis Elektronik (G2B/G2C)



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Januari 2024
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 000.9.3.2/92/SJ
TENTANG

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL
DAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital nasional serta memperhatikan:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

diminta perhatian Saudara/I untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam penerapannya.
2. Melakukan penyederhanaan proses bisnis, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik (baik intra maupun antar instansi) untuk penyelenggaraan layanan yang berfokus pada kebutuhan pengguna (*user centric*) dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal.
3. Melakukan konsolidasi seluruh aplikasi SPBE pemerintah daerah ke dalam 1 (satu) portal layanan pemerintah daerah, sebagai transisi konsolidasi ke dalam portal layanan nasional selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.
4. Mengoptimalkan penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu berbasis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

PERAN PEMDA UNTUK MEMASTIKAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL & KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL DI DAERAH

➤ **Penyederhanaan proses bisnis**

➤ **User centric** dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan & pelayanan publik

➤ **Konsolidasi seluruh aplikasi SPBE ke dalam 1 portal layanan Pemda sebagai transisi** konsolidasi ke dalam portal layanan nasional, yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional

➤ **Memastikan keterpaduan rencana & anggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE Pemda** berdasarkan hasil reviu*

➤ Pembagian peran **pembinaan & pengawasan** reviu keterpaduan rencana & anggaran SPBE :

- Lingkup **Pemerintah Provinsi** oleh **Kemendagri selaku Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional**
- Lingkup **Pemerintah Kota dan Kabupaten** oleh **Pemerintah Provinsi**

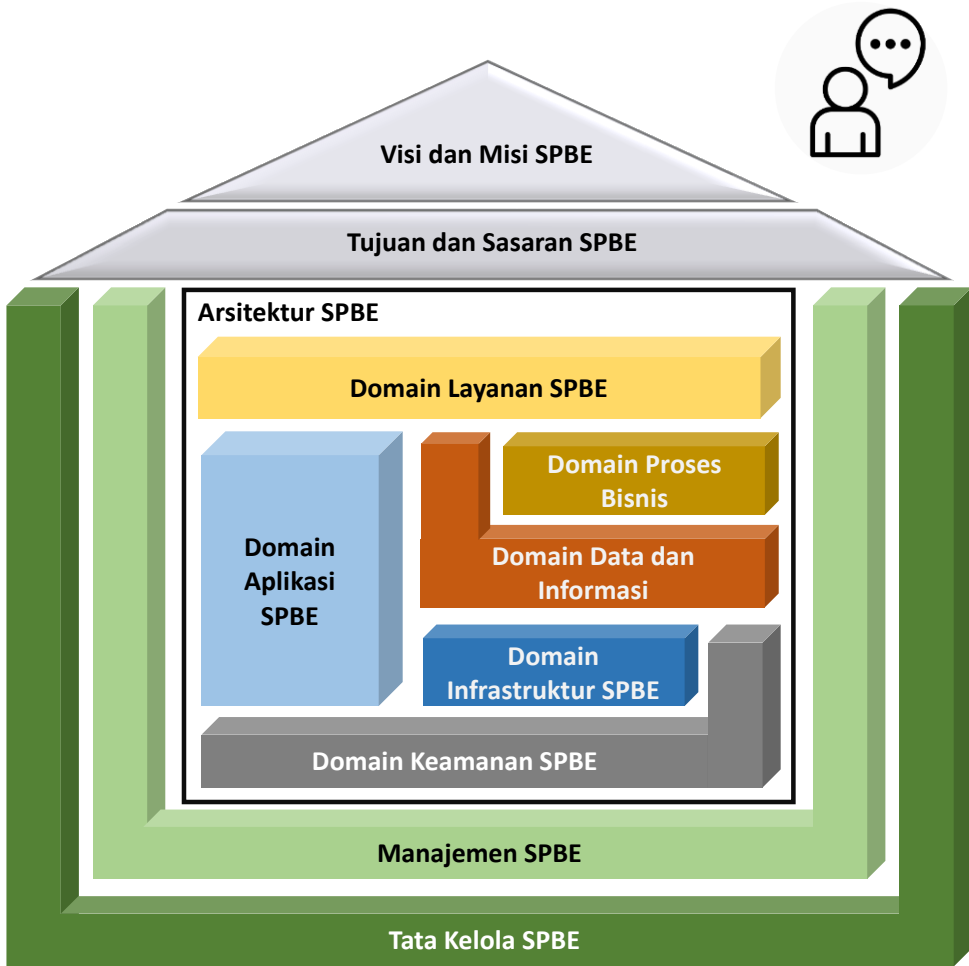
➤ Pelaporan percepatan transformasi digital di Pemda kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan

*reviu dilakukan oleh Bappeda



KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE

SESUAI AMANAT PERPRES 95/2018 DAN PERPRES 132/2022



KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE NASIONAL



DEFINISI

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi



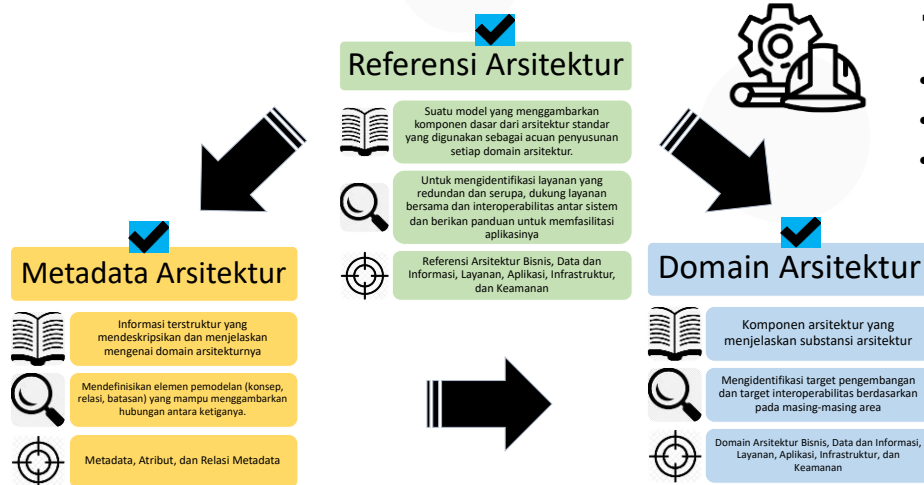
MANFAAT

Panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE



JANGKA WAKTU

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun



TERDIRI DARI

- Arsitektur SPBE Nasional
- Arsitektur SPBE Instansi Pusat
- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Kerangka Kerja ARSITEKTUR SPBE

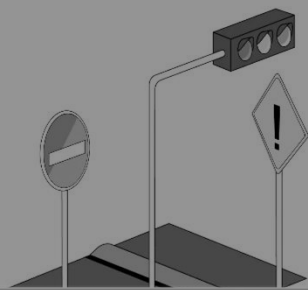
DEFINISI

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi

MANFAAT

- ✓ Menghilangkan tumpang tindih proses bisnis pemerintahan
- ✓ Menerapkan **standardisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital Nasional** (*Service Level Agreement*)
- ✓ Memudahkan **integrasi layanan pemerintah, melalui mekanisme interoperabilitas**, sehingga menumbuhkan-kembangkan **inovasi proses bisnis** dan layanan baru
- ✓ Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan **Satu Data Indonesia** 
- ✓ Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta memperkuat Keamanan Informasi
- ✓ Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga **meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE**

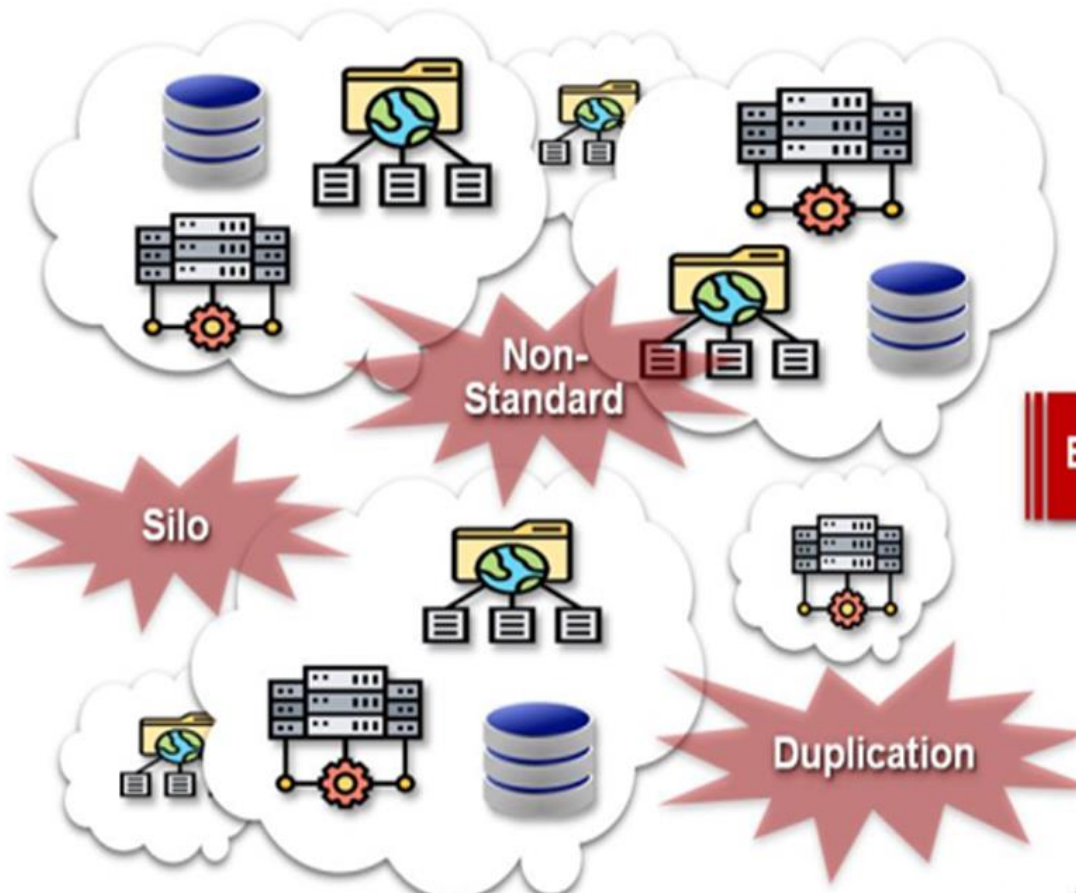




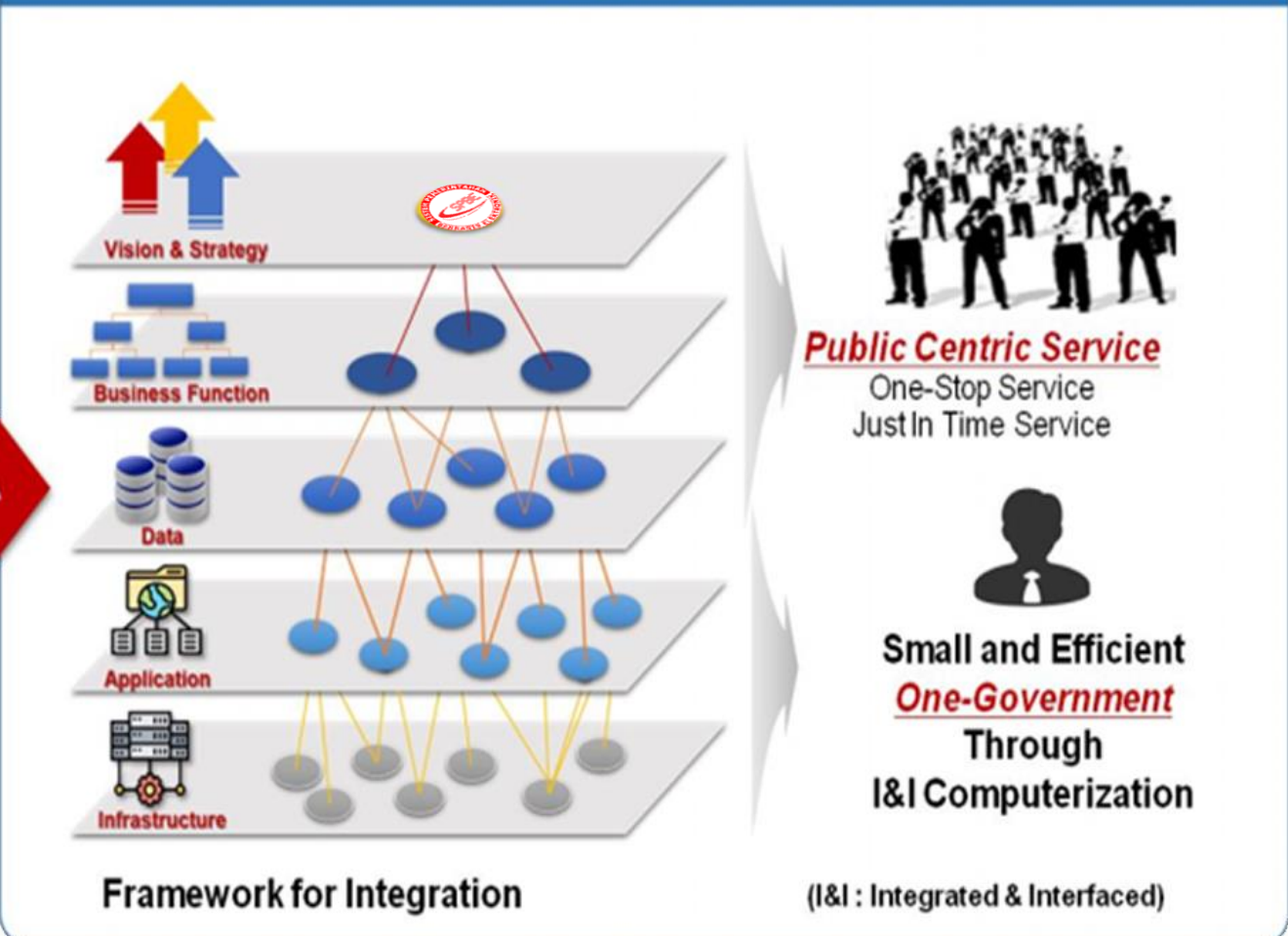
TANPA & DENGAN ARSITEKTUR SPBE

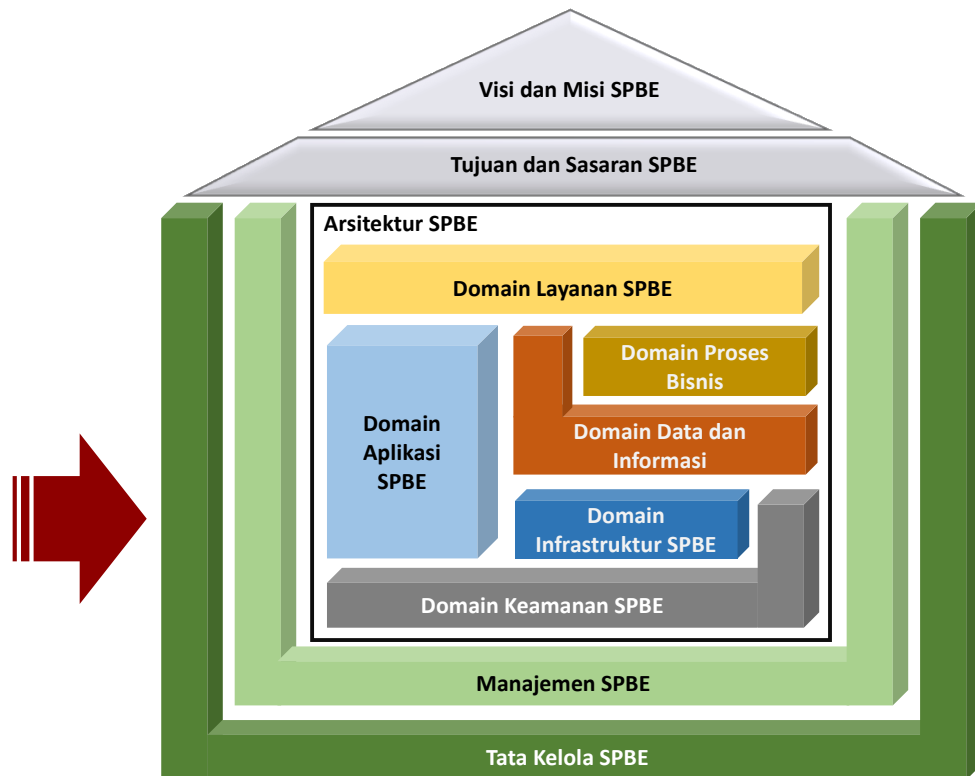
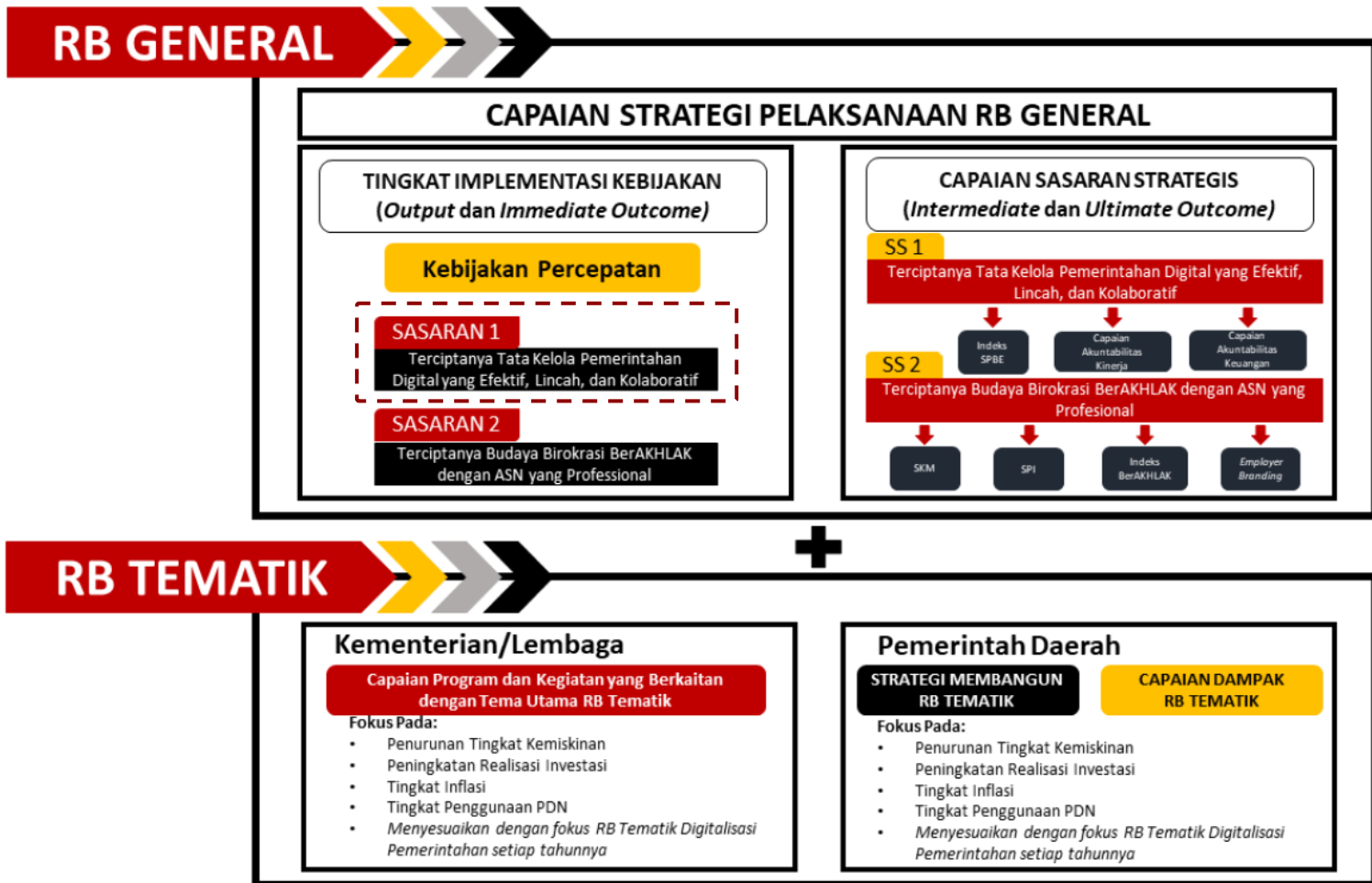


AS-IS



TO-BE





KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE NASIONAL (PERPRES 132/2022)

Gambar 4.1 Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi Eksternal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah



EVALUASI SPBE – INDEKS SPBE (PERMENPAN 59/2020)

Diukur dengan menggunakan metode tingkat kematangan (*e-government maturity model*). Untuk Tingkat kematangan penerapan arsitektur diukur berdasarkan **metode tingkat kematangan kapabilitas proses**.

Nilai Tingkat kematangan	Kriteria
1	Dokumen bukti dukung hanya berupa konsep/draft (belum ditandatangani secara resmi)
2	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang Belum mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)
3	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang Sudah mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)
4	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reviu dan evaluasi Telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menggunakan referensi arsitektur SPBE nasional ✓ Mendukung inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional
5	Dilakukan pemutakhiran (proses revitalisasi as-is dan to-be arsitektur secara periodik)

EVALUASI RB – INDEKS RB (PERMENPAN 9/2023)

Diukur pada tahap evaluasi eksternal yang dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional untuk mendapatkan gambaran objektif perkembangan hasil dan **dampak reformasi birokrasi**.

Nilai Tingkat kematangan	Kriteria
0	Belum memiliki arsitektur
1	Sudah memiliki arsitektur as-is
2	Memenuhi kriteria (1) dan sudah memiliki arsitektur to-be
3	Memenuhi kriteria (2) dan telah melakukan gap analysis serta menyusun peta rencana SPBE berdasarkan arsitektur SPBE (as-is, to-be, dan gap analysis-nya)
4	Memenuhi kriteria (3) dan telah mengimplementasikan arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan penganggaran SPBE (proses evaluasi belanja TIK)
5	Memenuhi kriteria (4) dan telah melakukan reviu/evaluasi arsitektur SPBE secara periodik sebagai sebuah siklus perbaikan berkelanjutan

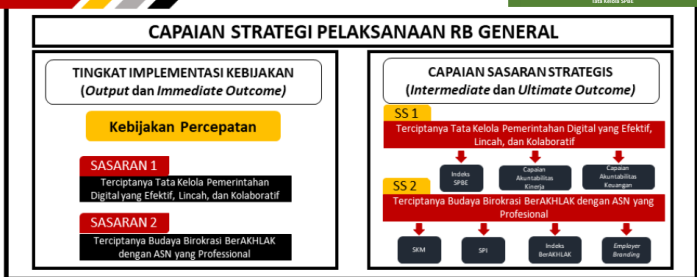


EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

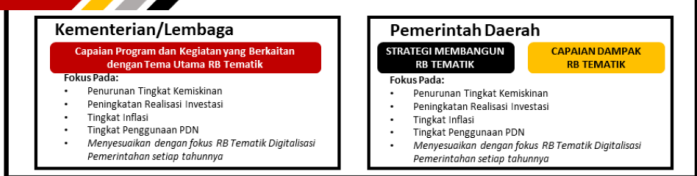


KepmenPANRB No. 739/2023 – Petunjuk Teknis Evaluasi RB 2023

RB GENERAL



RB TEMATIK

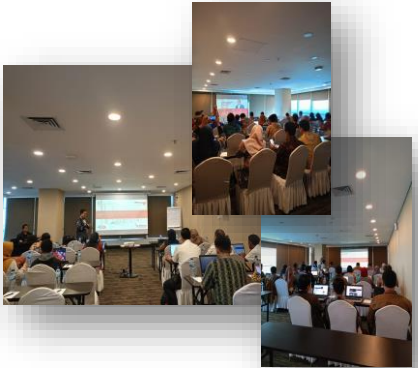


PermenPANRB 9/2023

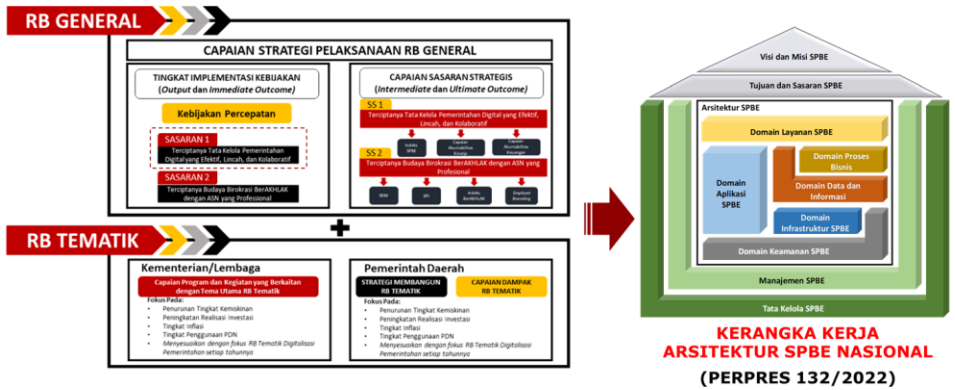
No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
11	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Kementerian PANRB c.q. Balaks dan Kementerian/Lembaga teknis terkait	adalah tingkat kematangan penerapan dan pelaksanaan tindakan-tindakan konkret yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran penerapan arsitektur SPBE. Tingkat ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh seluruh pihak yang terlibat di instansi untuk menerapkan aspek-aspek penting dalam kebijakan arsitektur SPBE, antara lain aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi proyek TIK.	0 - 5	(0) Belum memiliki arsitektur (1) sudah memiliki arsitektur <i>as-is</i> (2) memenuhi kriteria (1) dan sudah memiliki arsitektur <i>to-be</i> (3) memenuhi kriteria (2) dan telah melakukan <i>gap analysis</i> serta menyusun peta rencana SPBE berdasarkan arsitektur SPBE (<i>as-is</i> , <i>to-be</i> , dan <i>gap analysis</i> -nya) (4) memenuhi kriteria (3) dan telah mengimplementasikan arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan penganggaran SPBE (proses evaluasi belanja TIK) (5) memenuhi kriteria (4) dan telah melakukan <i>reviu/evaluasi</i> arsitektur SPBE secara periodik sebagai sebuah siklus perbaikan berkelanjutan	Telah memiliki arsitektur <i>as-is</i> , <i>to-be</i> , dan peta rencana SPBE (Nilai tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE = 3)

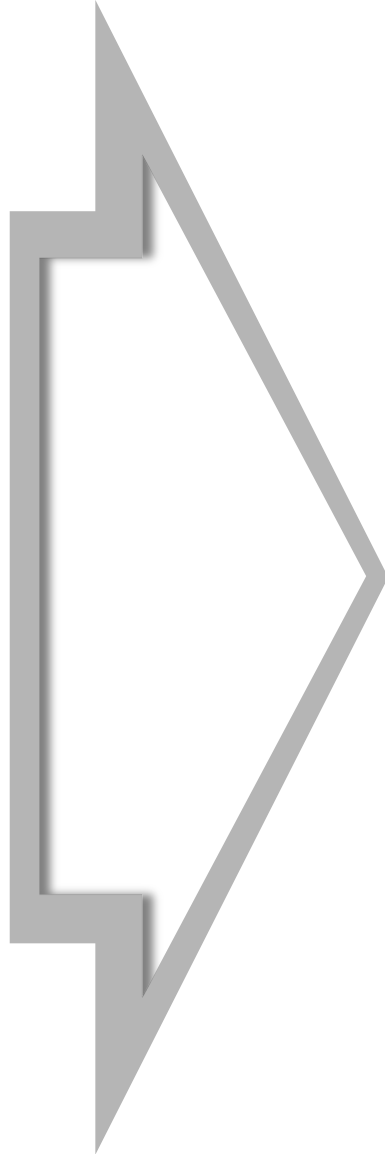
SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR (SIA) SPBE DALAM RANGKA MENDUKUNG **PENINGKATAN** PENILAIAN RB INSTANSI



Pelaksanaan Bimtek SIA-SPBE membantu IPPD memahami bagaimana implementasi arsitektur SPBE untuk mencapai sasaran RB General ke-1, yaitu
“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif”



SIA SPBE → <https://arsitektur.spbe.go.id>

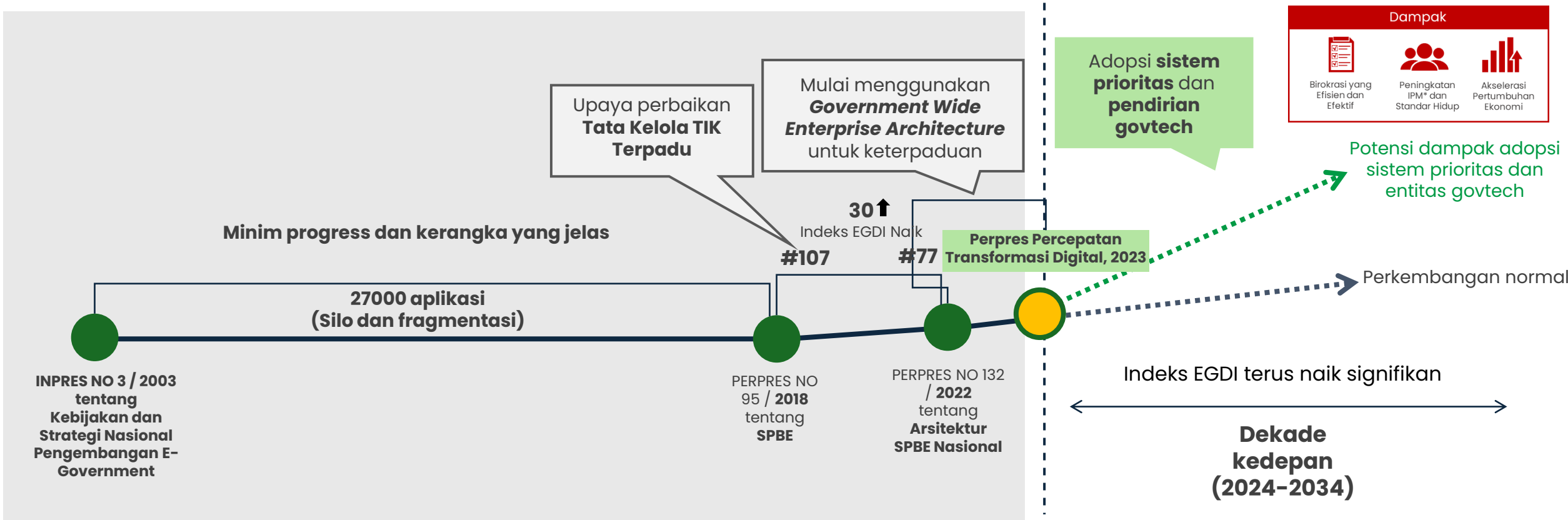


Amanat Perpres 132/2022

1. Instansi Pusat memiliki arsitektur SPBE di akhir tahun 2022 (as-is) dan Tahun 2023 (to-be)
2. Pemda memiliki arsitektur SPBE di akhir tahun 2023 (as-is) dan Tahun 2024 (to-be)

SELANJUTNYA, INDONESIA SAAT INI BERADA DI TITIK PERSIMPANGAN DAN PERIODE KRUSIAL TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH YANG AKAN MENENTUKAN KEHIDUPAN DIGITAL BANGSA BEBERAPA DEKADE KE DEPAN

Dalam satu dekade terakhir, berbagai negara di dunia telah mengakselerasi transformasi digital mereka melalui pendirian "govtech" dan juga pengembangan sistem-sistem strategis seperti *digital public infrastructure*. Indonesia **memiliki kesempatan untuk meloncat ke depan**.



Momentum yang sekarang terjadi akan sulit terulang kembali (sedang dikembangkan: digital id, data exchange platform, dan digital payment, seluruh K/L dan Govtech bergerak). Di sisi lain tidak memulai sesegera mungkin akan semakin memperjauh ketertinggalan bangsa dan mempersulit masyarakat untuk berkembang di era digital



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Seluruh Pimpinan K/L
& Kepala Daerah
perlu melaksanakan
**TRANSFORMASI
LAYANAN DIGITAL
MENYELURUH**



Konsolidasi seluruh layanan digital K/L/D ke 1 (SATU) Portal Layanan K/L/D sebagai transisi ke Portal Nasional



Pangkas proses bisnis semaksimal mungkin untuk mempermudah layanan



Tingkatkan keterpaduan layanan lintas sektor & institusi, hapus sekat sektoral & institusi yang ada



Sinergikan data lintas sektor untuk **perbaiki layanan**, manfaatkan **teknologi digital** untuk **memungkinkan pertukaran & pemanfaatan data yang aman**



Fokus ke kebutuhan pengguna, utamakan testimoni & pengalaman pengguna dalam mengevaluasi kebermanfaatan seluruh aplikasi yang ada, tinjau kembali yang tidak ramah pengguna

Layanan Terpadu dalam Satu Portal

Berbasis *Citizen Centric* mengakomodasi perjalanan hidup manusia (*moments of life*) dari lahir sampai tutup usia

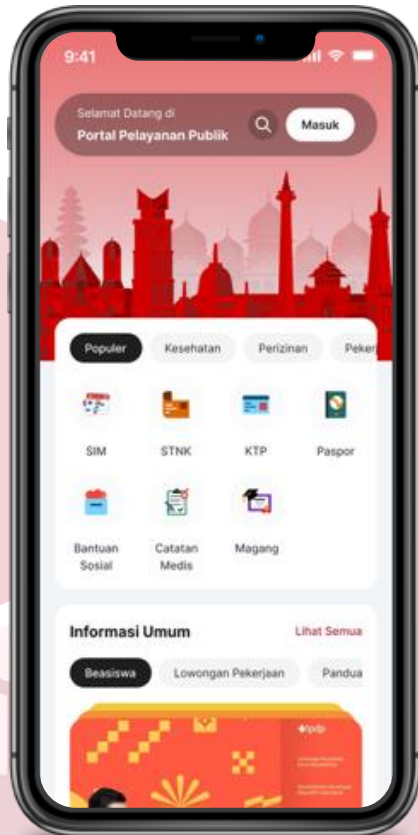
Identitas Kependudukan Digital (IKD)



Single Sign On

berbasis data kependudukan

Keamanan siber & sandi data



Data Exchange (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)



Tata Kelola Data dalam kerangka Satu Data Indonesia



Ibu Hamil Anak-anak
Gizi - Persalinan - Sekolah



Remaja
SIM - Perguruan Tinggi



Dewasa
Pekerjaan - Tempat Tinggal - Imigrasi - Pernikahan - Perceraian



Lansia
Sakit - Tutup Usia

Inisiasi Awal Layanan Terpadu pada Portal Nasional



Administrasi Kependudukan



Program Indonesia Pintar & Kartu Indonesia Pintar Kuliah



Antrean RS, Registrasi Dokter (STR), Sertifikat Vaksin & Imunisasi



Izin Penyelenggaraan Event (Izin Keramaian), SIM Online, SKCK



Cek Bantuan Sosial



Layanan Aparatur Negara



Info Penerima Bantuan / Pembayaran Digital PNB

Layanan lainnya yang sudah siap: Keimigrasian, BPJS, Pertanahan, Ketenagakerjaan, dll.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Menghapus Silo Perlu Diperkuat untuk Mewujudkan Layanan Digital Nasional Terpadu

Untuk mempercepat implementasi layanan digital terpadu maka perlu disepakati pengembangan INA PASS (identitas digital) sebagai solusi jalan tengah identitas digital dalam waktu dekat





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TERIMA KASIH